

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah sebuah dokumen perencanaan Rencana kerja (Renja) mempunyai tugas penting dalam sistim perencanaan daerah. Karena, Rencana Kerja (Renja) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran satu semesteran atau tahunan, Rencana kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Pada pertengahan tahun 2022, seiring berubahnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka, secara otomatis Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 juga akan berubah dengan tetap mengacu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RKPD, di mana RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut. Maka, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang bertujuan sebagai upaya rasionalisasi anggaran yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, yaitu : **Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, aman. Adil dan Sejahtera**".

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten sidenreng Rappang.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai pedoman dan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerjanya selama Tahun 2022 dan merupakan panduan, pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

I.4. Sistematika Penulisan.

Sistematik penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Landasan Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- II. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II. 5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Damkar
- III. 3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi (Perubahan) terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki.
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
- d. Kebijakan-Kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022.
- f. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dari tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022 dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang

telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021 terealisasi 100%. Khusus untuk program peningkatan Sumber Daya Manusia kami merasakan anggaran yang tersedia jauh dari ideal.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bias menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau memproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian kelulusan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena, dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya. Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif organisasi. Oleh karena itu, maka, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran, sebagai sub ordinansi dari didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang ada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme pengembangan pegawai pada Program Diklat Penjeingan maupun Diklat Fungsional. Sehingga, ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 (Tahun 2022)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019- 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD s/d triwulan II tahun 2022			Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA SKPD sampai dengan tahun berjalan						
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)					
	WAJIB													
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA	100%	2.108.039.850	2.260.670.400	916.971.300	194	2.994.011.150	2.262.505.465			
1	05	02	2	01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.546.488.000	1.660.670.400	781.662.300	171	2.297.150.300	2.262.505.465	
1	05	02	2	01	01	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</i>	<i>120</i>	<i>1.356.142.000</i>	1.500.247.300	697.912.300	47	2.054.054.300	1.711.711.917
1	05	02	2	01	04	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan</i>	<i>31</i>	<i>119.996.000</i>	120.423.100	50.750.000	42	170.746.000	550.793.548

1	05	02	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Yang Terlaksana	3	31.000.000					
1	05	02	2	01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	3						
1	05	02	2	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan	3	39.350.000	40.000.000	33.000.000	83	72.350.000	
1	05	02	2	01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun	1						
1	05	02	2	01	09	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	55						
1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya	100%	561.551.850	600.000.000	135.309.000	23	696.860.850	
1	05	02	2	02		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana	11					-	
1	05	02	2	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana	168	561.551.850	600.000.000	135.309.000	23	696.860.850	
1	05	02	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota	100%					-	
1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS	1					-	
1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPNYELAMATAN	100%	2.720.249.000	2.701.847.200	1.278.379.500	47	3.998.628.500	

						PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DAN EVAKUASI KORBAN							
1	05	04	0 2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.720.249.000	2.701.847.200	1.278.379.500	47	3.998.628.500	
1	05	04	0 2	01	01	<i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani</i>	<i>36</i>	2.579.852.000	2.701.847.200	1.278.379.500	47	3.858.231.500	
1	05	04	0 2	01	06	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan</i>	<i>14</i>	140.397.000				140.397.000	
1	05	04	0 2	01	07	<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih</i>	<i>11</i>					-	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	3.587.110.125				3.587.110.125	
1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.498.000				17.498.000	
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	45					-	
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana	45					-	
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana	45					-	
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	45	7.874.000	9.033.800	8.553.800	95	16.427.800	
1	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana	45	9.624.000	9.484.200		0	9.624.000	
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	12					-	

						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	3.241.966.429	3.436.456.000	1.707.669.364	50	4.949.635.793		
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	3.241.966.429	3.436.456.000	1.707.669.364	50	4.949.635.793		
1	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana	60					-		
1	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana	25					-		
1	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Terlaksana	25					-		
1	02	01	2	03		XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		
1	02	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun						-		
1	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana						-		
1	02	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun						-		
1	02	01	2	05		XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36					-		
1	02	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan						-		
1	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan	110					-		
1	02	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana						-		
1	02	01	2	06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	153.426.750	133.204.000	61.624.800	181	215.051.550		
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan						-		

						Bangunan Kantor	Bangunan Kantor Yang Diadakan							
1	02	01	2	06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2					-	
1	02	01	2	06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14	3.000.000	3.004.000	1.480.000	49	4.480.000	
1	02	01	2	06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.500	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50	15.000.000	
1	02	01	2	06	06	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	450	1.400.000	1.400.000	500.000	36	1.900.000	
1	02	01	2	06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	139.026.750	118.800.000	54.644.800	46	193.671.550	
1	02	01	2	07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8					-	
1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan	5					-	
1	02	01	2	07	06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2					-	
1	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1					-	
1	02	01	2	08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86.695.746	96.873.600	41.410.634	86	128.106.380	
1	02	01	2	08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	810.000	828.000		0	810.000	
1	02	01	2	08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	40.740.746	47.600.000	20.443.634	43	61.184.380	
1	02	01	2	08	03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120					-	
1	02	01	2	08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	45.145.000	48.445.600	20.967.000	43	66.112.000	
1	02	01	2	09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67	87.523.200				87.523.200	
1	02	01	2	09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	54	64.532.200	86.426.000	16.445.000	19	80.977.200	

						atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan Yang Diadakan						
1	02	01	2	09	02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	12	-			-	
1	02	01	2	09	09	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	22.991.000	10.440.000		0	22.991.000

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

USMAN DEMMA, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196051231 198611 1 045

SEKERTARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Hi ANDI GUSTIANTI, S.Sos

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19690828 199403 2 010

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu Penting dalam pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat dipengaruhi oleh luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 11 Kecamatan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan kantrantibmas dan kebakaran termasuk kebakaran hutan saat musim kemarau. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
5. Masih perlunya penambahan anggaran.
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang terutama Misi ke 7. Perubahan paradigma

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia.
- b. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko umum pada setiap pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum (Perda dan Perbub).
- c. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

- a. Koordinasi yang baik antar instansi di mana dengan terjalannya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi.
Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak luar
Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008.
2. Aspek kebutuhan personil, perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk unit Satpol PP Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil kecamatan. Disamping itu untuk Penegakan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada.
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patrol sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patrol 3 kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 5 (lima) Tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun ke depan.

Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Sidenreng Rappang dari waktu-waktu, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. *Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Pemberdayaan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Penyediaan Layanan Dalam Rangka Penegakan Perda dan Perkada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realalisasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

c. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.*

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.*

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah.*

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

f. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*

- Pengadaan Meubel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunannya lainnya

TABEL III.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2022								
								SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
								Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelomp ok Penerim a	Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelomp ok Penerim a	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						WAJIB										
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA		2.270.653.200	2.270.653.200			2.270.653.200	2.270.653.200		

1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.670.653.200	1.670.653.200			1.670.653.200	1.670.653.200
1	05	02	2	01	01	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</i>		1.500.247.300	1.500.247.300			1.500.247.300	1.500.247.300
1	05	02	2	01	04	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan</i>		120.423.100	120.423.100			120.423.100	120.423.100
1	05	02	2	01	05	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Yang Terlaksana</i>							
1	05	02	2	01	06	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i>							

1	05	02	2	01	07	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan</i>		40.000.000	40.000.000			40.000.000	40.000.000
1	05	02	2	01	08	<i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun</i>		9.982.800	9.982.800			9.982.800	9.982.800
1	05	02	2	01	09	<i>Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Jumla Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda</i>							
1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya		600.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000
1	05	02	2	02		<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i>							
1	05	02	2	02	03	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i>		600.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000
1	05	02	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota							
1	05	02	2	03	01	<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>	<i>Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS</i>							

1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN		2.701.847.200	2.701.847.200			2.701.847.200	2.701.847.200
1	05	04	02	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.701.847.200	2.701.847.200			2.701.847.200	2.701.847.200
1	05	04	02	01	01	<i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani</i>		2.701.847.200	2.701.847.200			2.701.847.200	2.701.847.200
1	05	04	02	01	06	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan</i>							
1	05	04	02	01	07	<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih</i>							
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.761.917.600	3.761.917.600			3.761.917.600	3.761.917.600

1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.518.000	18.518.000			18.518.000	18.518.000
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun							
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana							
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana							
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		9.033.800	9.033.800			9.033.800	9.033.800
1	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana		9.484.200	9.484.200			9.484.200	9.484.200
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.436.456.000	3.436.456.000			3.436.456.000	3.436.456.000
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.436.456.000	3.436.456.000			3.436.456.000	3.436.456.000

1	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan							
1	02	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana							
1	02	01	2	06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		110.204.000	110.204.000			110.204.000	110.204.000
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan							
1	02	01	2	06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1	02	01	2	06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.004.000	3.004.000			3.004.000	3.004.000
1	02	01	2	06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000
1	02	01	2	06	06	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		1.400.000	1.400.000			1.400.000	1.400.000
1	02	01	2	06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95.800.000	95.800.000			95.800.000	95.800.000
1	02	01	2	07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan							

1	02	01	2	07	06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
1	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan									
1	02	01	2	08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.873.600	96.873.600			96.873.600	96.873.600		
1	02	01	2	08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		828.000	828.000			828.000	828.000		
1	02	01	2	08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		47.600.000	47.600.000			47.600.000	47.600.000		
1	02	01	2	08	03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
1	02	01	2	08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48.445.600	48.445.600			48.445.600	48.445.600		
1	02	01	2	09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.866.000	96.866.000			96.866.000	96.866.000		
1	02	01	2	09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan		86.426.000	86.426.000			86.426.000	86.426.000		

1	02	01	2	09	02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan		10.440.000	10.440.000			10.440.000	10.440.000	
1	02	01	2	09	09	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022, ini merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dalam rangka menunjang Rencana Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah kabupaten Sidenreng Rappang, serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) pemerintah daerah Sidrap tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bahan dalam penyusunan usulan penilaian program dan kegiatan dengan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD T.A 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu sehingga pelaksanaannya dapat lebih berkualitas.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022. Maka, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Sidrap maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Demikian halnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbandingan dalam pencapaian kinerja organisasi ke depan, terutama di dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pangkajene, 20 Juli 2022
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran**

USMAN DEMMA, S.Sos
NIP. 19651231 198611 1 045

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah maupun Kepala Daerah sudah secara tegas dan jelas diatur, bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang ada. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan seringkali terjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan operasi penertiban Peraturan Daerah maupun Kepala Daerah Sidenreng Rappang, dimana terjadi kesalahan yang pada akhirnya dapat menjadi masalah hukum, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur, mendukung dan melindungi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan menjaga citra Satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

III.2.1. Tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih khususnya pada misi 7 : “Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif”

III.2.2. Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang ingin dicapai untuk tahun 2022, adalah :

- a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

III.2.3. Indikator Sasaran

Indikator yang ingin dicapai berdasarkan sasaran dari rencana kerja Satpol PP, yaitu :

- a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
- b. Berkurangnya pelanggaran Perda, Perbup dan Peraturan lainnya
- c. Tertanggulangnya bahaya kebakaran

III.3. Program dan Kegiatan

III.3.1. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Kerja tahunan yang merupakan turunan dan Rencana Strategis 5 tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

2. **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

a. ***Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Pemberdayaan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;

- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyediaan Layanan Dalam Rangka Penegakan Perda dan Perkada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

c. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

j. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

k. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.*

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

l. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.*

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

m. *Administrasi Umum Perangkat Daerah.*

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

n. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*

- Pengadaan Meubel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

o. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.

p. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunannya lainnya

TABEL III.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	TAHUN ANGGARAN 2022							
								SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			Kelompok Penerima
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
						WAJIB									
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA		2.270.653.200	2.270.653.200		888.990.900	888.990.900		

1	05	02	2	01	07	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan</i>		40.000.000	40.000.000			7.000.000	7.000.000
1	05	02	2	01	08	<i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun</i>		9.982.800	9.982.800			9.982.800	9.982.800
1	05	02	2	01	09	<i>Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda</i>							
1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya		600.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000
1	05	02	2	02		<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i>							
1	05	02	2	02	03	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana</i>		600.000.000	600.000.000			464.691.000	464.691.000
1	05	02	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota							
1	05	02	2	03	01	<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>	<i>Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS</i>							

1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN		2.701.847.200	2.701.847.200			142.346.700	142.346.700
1	05	04	02	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.701.847.200	2.701.847.200			142.346.700	142.346.700
1	05	04	02	01	01	<i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani</i>		2.701.847.200	2.701.847.200			142.346.700	142.346.700
1	05	04	02	01	06	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan</i>							
1	05	04	02	01	07	<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih</i>							
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.781.917.600	3.781.917.600			1.949.214.002	1.949.214.002

1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.518.000	21.518.000			12.964.200	12.964.200
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun							
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana							
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana							
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		9.033.800	9.033.800			480.000	480.000
1	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana		9.484.200	9.484.200			9.484.200	9.484.200
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-			3.000.000	3.000.000
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.436.456.000	3.436.456.000			1.728.786.636	1.728.786.636
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.436.456.000	3.436.456.000			1.728.786.636	1.728.786.636

1	02	01	2	07	06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
1	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan							
1	02	01	2	08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.873.600	96.873.600			55.462.966	55.462.966
1	02	01	2	08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		828.000	828.000			828.000	828.000
1	02	01	2	08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		47.600.000	47.600.000			27.156.366	27.156.366
1	02	01	2	08	03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1	02	01	2	08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48.445.600	48.445.600			27.478.600	27.478.600
1	02	01	2	09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.866.000	96.866.000			80.421.000	80.421.000
1	02	01	2	09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan		86.426.000	86.426.000			69.981.000	69.981.000

1	02	01	2	09	02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan		10.440.000	10.440.000			10.440.000	10.440.000
1	02	01	2	09	09	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

MENGETAHUI,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

USMAN DEMMA, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196051231 198611 1 045

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Hj ANDI GUSTIANTI, S.Sos
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19690828 199403 2 010

